

## **POLITIK PATRONASE DI KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS**

*Political Patronage in Bontoa District Maros Regency*

**Abdul Chalid**

Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

email: bibbi\_pariwa@yahoo.com

### **Abstract**

*The central government disburses Sekaya Maritime program which is then used in patronage politics before elections in 2015 at Bontoa Sub-district, Maros District. This study aims to determine the pattern of distribution of political interests that take advantage of Sekaya Maritime from the elite to the middle of fishing communities Bontoa. Descriptive qualitative research method with written data in the form of documents, scientific papers, and bibliography, as well as oral data through direct interviews with respondents or resource persons in the field. Informant been with the compliance technique and snowball. The results are analyzed descriptively, and show that it is so capital Sekaya Maritim politics of patronage by the incumbent. Program channeled through the actor intermediary (broker or middleman) in the form of pork barrel projects, and in-kind for the group (club goods). Political actors or patrons intermediary is a person who has influence in the fishing communities, such as retainer, head of the fishermen's groups, networks of government bureaucracy, both in the district, or village level, up to the hamlet. Also the political parties and religious networks. They establish relationships Patron-client clientelistic.*

**Keywords:** *Political patronage, political actors, fishermen, Sekaya Maritime*

### **Abstrak**

Pemerintah pusat mengucurkan program Sekaya Maritim yang kemudian dimanfaatkan dalam politik patronase menjelang Pilkada serentak tahun 2015 di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola distribusi kepentingan politik yang memanfaatkan Sekaya Maritim dari elit ke tengah masyarakat nelayan Bontoa. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan data tertulis berupa dokumen-dokumen, karya ilmiah, dan kepustakaan, serta data lisan melalui wawancara langsung dengan responden atau narasumber di lapangan. Narasumber dipilih dengan teknik keseuaian dan bola salju. Hasilnya dianalisis secara deskriptif, dan menunjukkan bahwa Sekaya Maritim memang jadi modal politik patronase oleh petahana. Program disalurkan melalui aktor perantara (*broker atau middleman*) dalam bentuk proyek pork barrel, dan berupa barang untuk kelompok (*club goods*). Aktor politik atau patron perantara adalah sosok yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat nelayan, seperti punggawa, ketua kelompok nelayan, jejaring birokrasi pemerintahan, baik di kecamatan, maupun tingkat desa, hingga dusun. Juga Jejaring partai politik dan agama. Mereka menjalin relasi patron-klien yang klientelistik.

**Kata Kunci :** Politik Patronase, Aktor Politik, Nelayan, Sekaya Maritim.

## **PENDAHULUAN**

Tahun 2015, Kabupaten Maros merupakan satu-satunya daerah mendapat bantuan program Sekaya Maritim (Seribu Kampung Nelayan Mandiri, Tangguh, Indah, dan Maju). Tepatnya di Kecamatan Bontoa, daerah pesisir di bagian tenggara Kota Maros yang penduduknya mayoritas nelayan, atau hidupnya bergantung pada sumber daya laut. Bantuan tersebut mencapai Rp 9.000.000.000.

Meski demikian, bantuan ini tidak dapat mengakomodasi seluruh kepentingan

masyarakat nelayan di Kecamatan Bontoa. Bantuan modal usaha misalnya, dalam realisasinya hanya bisa diberikan kepada dua hingga tiga kelompok nelayan saja di kecamatan tersebut. Sementara kelompok nelayan yang membutuhkan hampir terdapat di semua desa. Begitupula bantuan dalam bentuk lainnya.

Kemiskinan nelayan merupakan modal mengukuhkan patronase. Kondisi itu mendorong individu nelayan mencari patron yang bisa memberi perlindungan, baik secara sosial, ekonomi, dan rasa aman. Menurut Pelras (2009), patronase berasal dari Romawi Kuno yaitu model hubungan sosial seorang *patronus* dari kalangan bangsawan yang memiliki sejumlah warga dari tingkat lebih rendah disebut *clientes* yang berada di bawah perlindungannya. Dalam politik, Scott (1972), menafsirkan patronase sebagai relasi dua arah ketika seseorang memiliki status sosial ekonomi lebih tinggi (patron), menggunakan pengaruh dan sumber daya dimilikinya untuk memberi perlindungan pada orang lain yang memiliki status sosial ekonomi lebih rendah (klien). Perlindungan itu ditukar dengan dukungan dan bantuan kepada patron. Oleh karena itu, pada masyarakat nelayan, relasi patron-klien yang didasarkan kepada modal ekonomi, tumbuh subur. Misalnya konsep hubungan Punggawa-Sawi pada nelayan Makassar. Sawi sebagai individu miskin, terikat pada patron, dalam hal ini punggawa yang memiliki kapital dan akses sumber daya luas.

Lebih spesifik lagi, Aspinall & Sukmajati (2015), mengatakan, politik patronase sebagai pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau penggiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka. Praktik politik patronase menjadikan sumber daya pemerintah, seperti program berbasis sosial sebagai alat tukar kesetiaan, atau dukungan politik. Terutama aktor politik petahana. Dalam relasi ini, program disalurkan melalui patron perantara. Banyak peneliti menyebutnya, broker atau *middleman*. Pada nelayan, selain punggawa tadi, terdapat pula aktor-aktor lain yang mungkin memiliki pengaruh (Scott, 1972; Weingrod, 1968).

Kajian dan analisis politik patronase telah banyak dilakukan sebelumnya. Seperti pada pemanfaatan dana-dana sosial dalam elektoral di tahun 2009 dan 2014 (Aspinall, 2014); perlindungan sosial dan klientelisme oleh Sumarto (2014), membahas tentang pemanfaatan dana-dana sosial, bantuan pendidikan, bantuan tunai oleh politisi untuk kepentingan pemenangan pada proses elektoral di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian pula penelitian yang mengurai praktik politik patronase, seperti penelitian Muhtadi (2013), "*Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah*

*Kajian Awal Interaksi Antara “Party ID” dan Patron-Client*”. Hasilnya menyatakan bahwa rendahnya *party-id* juga berkontribusi bagi semakin maraknya politik uang di tingkat massa. Semakin rendah *party id* seseorang semakin besar kemungkinan dia menerima praktik politik uang. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat *party id* pemilih maka semakin kecil sikap penerimaannya terhadap praktik politik uang. Selain Muhtadi, kita dapat membaca pada temuan-temuan penelitian seperti Hiariej (2005); Pemilu, politik patronase dan ideologi Parpol (Harjanto 2012), serta temuan lembaga pengawas pemilihan umum independen, Perludem (2012), tentang praktik penggunaan dana publik dalam kampanye di berbagai perhelatan pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden.

Sistem politik langsung, persaingan bebas dan terbuka (liberal), kemiskinan, lemahnya identitas politik individu dan partai politik, menjadi kajian utama dalam praktik politik patronase sebelumnya. Tetap lebih terkonsentrasi pada geografi dan demografi masyarakat agraris dan perkotaan. Sementara pada masyarakat nelayan belum pernah lebih spesifik. Padahal, masyarakat nelayan memiliki karakteristik unik sebagaimana disebut pada paragraf sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menggambarkan, bentuk politik patronase pada masyarakat nelayan, dan bagaimana distribusi kepentingan aktor politik lokal dilakukan melalui konsep tersebut ke tengah-tengah masyarakat nelayan. Terutama dengan pemanfaatan program dan anggaran publik yang di Kabupaten Maros, dianalisis melalui implementasi Sekaya Maritim pada nelayan.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini deskriptif analisis. Datanya diambil dari informan yang dipilih dengan menggabungkan teknik kesesuaian dan bola salju. Teknik kesesuaian yaitu memilih informan dan sumber-sumber lainnya yang dianggap oleh peneliti, sesuai rumusan masalah dalam objek penelitian ini. Sedangkan teknik bola salju, yaitu menetapkan informan atau narasumber, serta sumber-sumber lainnya yang memiliki karakteristik berbeda berdasarkan petunjuk dari informan lain ketika penelitian berlangsung. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada pertimbangan subyektif peneliti. Tetapi didasarkan pada kedalaman masalah dan kemampuan menerjemahkan fenomena ke dalam analisis yang dalam serta sistematis.

Penelitian kualitatif tidak ditujukan untuk menarik kesimpulan suatu populasi melainkan untuk mempelajari karakteristik yang diteliti, baik itu orang ataupun kelompok sehingga keberlakuan hasil penelitian tersebut hanya untuk orang atau kelompok yang sedang diteliti tersebut. Konsekuensi dari dasar pemikiran tersebut ialah pemilihan sampel tidak bergantung pada kuantitas tetapi lebih pada kualitas orang yang akan diteliti yang biasa kita sebut sebagai informan. Banyak sedikitnya orang yang akan digunakan menjadi informan dalam penelitian, tergantung pada cakupan masalah penelitian yang akan dilakukan (Jonathan, 2006).

Penulis dalam pengumpulan data menggunakan 2 teknik, yaitu wawancara dan data kepustakaan, serta dokumen dalam bentuk lainnya. Penulis melakukan wawancara langsung dengan informan yang telah ditentukan berdasarkan teknik kesesuaian dan bola salju. Pada penelitian ini, wawancara menggunakan standar terbuka berdasarkan panduan umum wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Dengan model tersebut, penulis berharap mampu mengelaborasi setiap pertanyaan menjadi lebih spesifik sesuai rumusan masalah, dan menghindari jawaban atau keterangan yang dangkal dari informan.

Pengumpulan data melalui teknik kepustakaan dilakukan pada awal penelitian hingga penyusunan hasil penelitian lapangan. Di samping itu, peneliti juga memperkuat dan melengkapi data dengan dokumen yang bersumber dari pemerintah, seperti persuratan, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan lain sebagainya. Dokumen lain yaitu dapat pula ditelusuri pada liputan atau pemberitaan dari media massa, seperti media cetak maupun media elektronik yang relevan dengan kajian studi.

Sebagaimana lazimnya pada penelitian kualitatif, data dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan atau narasumber ditetapkan berdasarkan teknik tertentu sebelumnya. Untuk memperoleh data sekunder yang akurat, selain mencatat, peneliti juga akan merekam komunikasi dua arah yang berlangsung dengan informan. Data Sekunder, yaitu data-data tersedia sebelumnya yang dapat diperoleh peneliti dari penelusuran dokumen-dokumen, baik yang berbentuk kepustakaan, karya ilmiah, dokumen pemerintah, video, rekaman suara, baliho, dan lain sebagainya.

Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Prosedur analisis data kualitatif dibagi dalam lima langkah, yaitu: 1) mengorganisasi data; 2) membuat

kategori, menentukan tema, dan pola; 3) menguji hipotesis yang muncul dengan menggunakan data yang ada; 4) mencari eksplanasi alternatif data, dan 5) menulis laporan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Hasil*

Implementasi Sekaya Maritim tahun 2015 di Kecamatan Bontoa dilakukan dalam dua bentuk program yaitu pembangunan infrastruktur publik, dan bantuan barang untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan. Infrastruktur publik meliputi pembangunan rabat beton jalanan kampung yang menelan biaya 800 ratus juta rupiah untuk 1,5 kilometer jalan. Desa-desa yang tersentuh bantuan pembetonan jalan, yaitu Desa Tunikamaseang, Desa Tupabbiring, Desa Bontobahari, Desa Ampekale, dan Desa Pajukukang.

Berikutnya, dalam bidang ini, pemerintah membangun fasilitas publik MCK (Mandi, Cuci, Kakus). Program ini dibangun di 5 (lima) desa, masing-masing Desa Ampekale 3 unit, Pajukukang 3 unit, Tunikamaseang 3 unit, Bontobahari 3 unit, dan Desa Tupabbiring 3 unit. Pada tingkat desa, skala prioritas lokasi pembangunan diperkecil lagi pada dusun tertentu. Dan, kemudian pembangunan Jembatan Kayudi Dusun Balossi, Desa Pajukukang. Jembatan tersebut memudahkan akses warga yang menghubungkan ke desa lainnya. Lalu untuk melengkapi proyek infrastruktur, pemerintah membangun pula talut jalan di dusun Jangka Jangkaya, Desa Tunikamaseang sepanjang 200 meter, dan pembangunan dermaga kampung nelayan.

Terdapat pula pembangunan Balai Sekaya Maritim di Desa Tupabbiring. Balai diperuntukkan untuk berbagai aktivitas sosial dan kenelayan oleh masyarakat di sekitar PPI, antara lain; pertemuan, pelatihan, acara adat, acara keagamaan, dan lain-lain. Pemanfaatan balai oleh nelayan dan masyarakat umum akan mengikuti aturan yang disusun dan disepakati bersama nelayan setempat. Sementara perawatan dan pemeliharaan oleh penanggungjawab, yaitu kelompok nelayan.

Pada penyaluran bantuan pada masyarakat Bontoa, nelayan disyaratkan untuk membentuk kelompok. Pengorganisasian ini bertujuan untuk mengelola bantuan secara tepat dan berlangsung secara merata. Selain proyek infrastruktur, pemerintah memberikan pula bantuan dalam bentuk barang seperti peralatan bengkel motor. Setiap anggota nelayan bisa memanfaatkan bengkel secara cuma-cuma untuk memperbaiki kerusakan mesin perahu serta kelengkapan melaut yang sering mereka alami. Tiap desa di Bontoa mendapat jatah 1 unit. Itu berarti pula, hanya 1 kelompok nelayan yang menerima. Sementara dalam satu desa, biasanya terdapat minimal 3 kelompok nelayan.

Sekaya Maritim adalah rangkaian bantuan pemerintah pusat yang dialokasikan untuk masyarakat nelayan Bontoa. Sebelumnya, gelontoran bantuan juga telah dilakukan seperti program Minapolitan yang banyak digunakan untuk membangun dan memperbaiki dermaga di daerah tersebut. Demikian pula bantuan dalam bentuk alat tangkap seperti kapal dan bubu untuk kepiting.

Bantuan Sekaya Maritim dan sejenisnya adalah usaha positif pemerintah dalam memajukan masyarakat nelayan yang dikenal tertinggal dari sisi ekonomi. Kebijakan ini diterapkan lebih giat oleh pemerintah di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla. Namun, sebagaimana nasib berbagai program pembangunan pemerintah lainnya, Sekaya Maritim juga bersifat terbatas sehingga tidak dapat dibagi secara merata kepada nelayan yang membutuhkan. Dalam penyalurannya pemerintah mesti menetapkan kelompok sasaran berdasarkan daftar prioritas, sehingga pada konteks inilah, bantuan Sekaya Maritim menjadi “mahal” di mata masyarakat nelayan. Bagi komunitas ini, sumber daya ekonomi alternatif selain sumber ekonomi utama mereka di lautan sangat penting, minimal sumber daya ekonomi tersebut dapat menyokong tingkat produktifitas melaut mereka.

Akan tetapi bagi aktor politik lokal di Kecamatan Bontoa, tingkat kebutuhan nelayan terhadap bantuan justru bisa menjadi modal politik dalam rangka memperluas pengaruh di tengah masyarakat nelayan. Khususnya bagi aktor politik yang berafiliasi pada kandidat petahana pada momentum elektoral di Maros, seperti pada pemilihan kepala daerah secara serentak 2015. Meski sebagian aktor politik setempat berusaha menampilkan logika politik ini, tetapi kenyataan menunjukkan terjadinya praktik pemanfaatan program. Terlebih lagi, program Sekaya Maritim dari pemerintah pusat memiliki celah untuk dimanfaatkan sebagai alat perlindungan dalam praktik politik patronase.

Salah satu celah untuk memanfaatkan program ini misalnya dapat dicermati pada penentuan skala prioritas lokasi pembangunan yang diputuskan pada tingkat eksekutif maupun legislatif di Kabupaten Maros. Meski Sekaya Maritim merupakan program terencana dan dibiayai langsung pemerintah pusat, akan tetapi pada tingkat penentuan sasaran di tingkat kabupaten, aktor politik petahana dan jaringan politiknya, memiliki pengaruh, dan dapat menentukan arah dan sasaran pembangunan tersebut. Misalnya saja pengaruh dalam memprioritaskan lokasi pembangunan rabat beton jalan desa dan dusun, MCK, lokasi pembangunan jembatan, talut, pembangunan dermaga, penentuan kelompok nelayan yang

menerima bantuan bengkel motor, pelatihan-pelatihan usaha nelayan oleh pemerintah daerah, bahkan modal usaha untuk nelayan di Kecamatan Bontoa.

Penentuan sasaran dilakukan atas pertimbangan politik untuk kepentingan Pilkada serentak Politik patronase di Bontoa memanfaatkan beberapa jalur, yaitu; (1) Jejaring Aktor Pemerintahan dan Birokrasi; (2) Jejaring partai politik; (3) Jejaring Punggawa; dan (4) Jejaring Kelompok nelayan. Peran mereka sangat efektif, karena dalam pemilihan legislatif dan Pilkada serentak, petahana meraih kemenangan pada basis penantangannya dari Partai Golkar di daerah itu. Target 2 (dua) kursi Partai Amanat Nasional yang diketuai petahana pada daerah pemilihan 2 (dua), meliputi Kecamatan Bontoa dan Kecamatan Lau tercapai.

Jejaring di atas membentuk pola kerja piramida yang secara struktural memiliki fungsi menyalurkan kepentingan aktor politik dari puncak piramida, dan sebaliknya menjamin dukungan politik dari dasar piramida, yaitu masyarakat nelayan kebanyakan.

Pada Pilkada serentak 2015, Petahana sukses mereduksi suara penantang di beberapa basis penantangannya di Kecamatan Bontoa. Dapat dilihat pada perolehan suara di beberapa desa, seperti di Desa Ampekale, Desa Pajukukang, Desa Bonto Bahari, dan desa-desa lainnya di Bontoa. Sebagian besar komunitas yang tersebar di sejumlah dusun yang tersebar di desa-desa di kecamatan ini merupakan basis penantang yang merupakan keturunan para raja-raja lokal setempat. Selama orde baru, dan beberapa periode setelah reformasi, daerah ini juga menjadi salah satu lumbung suara Partai Golkar di Maros.

Petahana pada Pilkada serentak 2015, berhasil mengungguli perolehan suara penantang di daerah basisnya ini. Berdasarkan perolehan suara Pilkada serentak 2015 yang dirilis Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Maros, petahana memperoleh sebesar 7.898 suara atau setara dengan 59,40 persen. Sedangkan penatangannya hanya mampu meraup 5.098 suara atau 38,34 persen di basisnya tersebut.

Pengaruh strategi politik patronase dalam kemenangan petahana di Kecamatan Bontoa diakui oleh aktor politik atau anggota legislatif PAN dari wilayah Bontoa, Haji Idham (bukan nama sebenarnya). Menurutnya, jejaring yang mereka buat, sukses menjalankan misi politik, dan mendistribusikan kepentingan petahana dan partainya pada masyarakat nelayan. Termasuk kepentingan dirinya sebagai anggota legislatif dari PAN. Tiap perantara tersebut kemudian diberi kompensasi proyek dan daerahnya diprioritaskan mendapatkan bantuan.

## Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan terjadinya praktik patronase pada implementasi program Sekaya Maritim di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Meski tidak seluruhnya, tetapi sebagian kegiatan dalam bentuk proyek dan bantuan barang disalurkan sebagai modal dan alat tukar. Diberikan kepada desa, dusun, dan kelompok nelayan tertentu dengan catatan, mereka memenangkan petahana dalam Pilkada serentak di daerahnya masing-masing. Penyalurannya dilakukan melalui aktor-aktor perantara, yang secara politik memiliki pengaruh di tengah masyarakat nelayan. Dalam kajian politik patronase sebelumnya, bentuk proyek dan program yang dimanfaatkan sebagai modal untuk ditukar ke klien disebut *pork barrel* atau proyek-proyek infrastruktur dan *public goods*. Peyalurannya memanfaatkan jejaring patron-klien, aktor-aktor politik perantara atau disebut *broker*, atau *middleman* (Aspinall, 2014). Namun penggunaan istilah ini hanya bentuk identifikasi yang berbeda-beda di kalangan peneliti dan ahli ilmu politik.

Di Bontoa, terdapat banyak aktor politik perantara yang menghubungkan petahana sebagai patron dengan nelayan sebagai klien. Tetapi beberapa saja yang dikenal memiliki pengaruh kuat, dan dekat dengan petahana. Aspinall (2014), menyebutkan bahwa hubungan ini lazim dalam politik patronase dan sering dikenal dengan istilah klientelistik. Demikian pula Hanif (2010), menyebutkan bahwa hubungan patronase yang melibatkan kedekatan personal disebut klientelistik.

Di antara yang memiliki hubungan klientelistik dengan petahana yaitu Haji Idham (bukan nama sesungguhnya), seorang politisi yang kini duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maros. Ia dipilih dari daerah pemilihan wilayah dua Maros yang di dalamnya terdapat Kecamatan Bontoa. Haji Idham aktif pula sebagai pengurus Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Maros. Partai yang diketuai bupati atau petahana. Sebagai patron perantara dalam jejaring patronase politik petahana, Haji Idham membenarkan efektifitas jejaring politik yang mereka bangun. Terutama jejaring punggawa dan kelompok nelayan. Sebab itu, ia menjalin hubungan dengan mereka. Dalam hubungan timbal balik tersebut, Haji Idham mengaku mempertukarkan program pemerintah, termasuk Sekaya Maritim, dengan dukungan politik dari punggawa. Ia memprioritaskan pembangunan rabat beton pada jalan-jalan desa, dusun, dan lokasi punggawa bermukim. Sebagaimana disebutkan dalam wawancara sebagai berikut :

*“Menjelang moment-moment penting itu, saya tegaskan kepada punggawa, bantu saya di Pileg dan pemenangan Pilkada serentak, saya akan bangunkan jalan beton sampai depan rumahmu. Ia berjanji,*

*dan saya akhirnya bangunkan jalan beton sampai depan rumahnya. Alhamdulillah, hubungan kami kian dekat. Dia tidak bisa ke mana-mana lagi. Pada Pileg, perolehan suara saya hampir mencapai dua suara di Bontoa, dan Pilkada petahana kami menang.”*

Menurut Haji Idham, lebih mudah lagi, bila kegiatan dalam program batuan pusat juga diperbantukan melalui daerah. Mereka bisa melakukan intervensi ke unit kerja dalam pemerintahan, dengan mengajukan program pembangunan fasilitas publik, serta kegiatan berbasis kerakyatan lainnya ke lokasi tertentu. Tidak hanya itu, penyaluran barang bantuan yang bersifat *club goods* juga melalui punggawa. Di tingkat desa, punggawa menjadikan barang-barang tersebut sebagai nilai tukar, dan pengukuh relasi patron-kliennya dengan nelayan. Tidak jarang, punggawa memegang posisi ketua kelompok nelayan. Dengan demikian, posisinya sebagai patron bagi nelayan di daerahnya semakin kuat pula. Salah satu syarat penyaluran bantuan dalam bentuk barang ke nelayan, mereka harus punya kelompok nelayan yang dilegitimasi pemerintah daerah.

Kelompok nelayan memiliki pengaruh ke dua dalam distribusi kepentingan politik petahana di Kecamatan Bontoa. Haji Idham sebagai aktor politik perantara paling kuat dalam struktur jejaring politik patronase di bawah petahana, memanfaatkan pengaruh kelompok nelayan. Pada masyarakat nelayan di Bontoa, punggawa bukan lagi satu-satunya aktor perantara yang dapat mendominasi pengaruh politik terhadap nelayan. Kian banyaknya program bantuan dan pemberdayaan pada masyarakat nelayan, membuka kran terhadap modal usaha. Perbankan memberi pula kemudahan, sehingga memungkinkan individu mengakses modal dan sumber daya. Di antara nelayan muncul pula individu-individu yang kritis terhadap kondisi ekonomi mereka, serta memahami organisasi. Mereka muncul di luar punggawa sebagai aktor perantara yang kuat.

Di kecamatan Bontoa, kelompok nelayan banyak didirikan nelayan. Di satu dusun misalnya, bisa terdapat tiga hingga kelompok nelayan. Sementara satu desa di daerah itu, bisa terdapat hingga 6 dusun. Tetapi penelitian di Bontoa ini, kita bisa melihat peran kelompok nelayan di Dusun Binasangkara, Desa Ampekale. Kelompok nelayan di dusun tersebut bahkan telah menggeser peran dan fungsi politik punggawa sebagai aktor perantara dalam relasi patron-klien dengan elit politik. Kelompok nelayan itu diketuai seorang nelayan muda, Rusman. Berbeda dengan punggawa, kelompok nelayan membangun nilai tawar atas kesadaran bersama, dan untuk kepentingan bersama. Keputusan juga diambil melalui musyawarah bersama sehingga dukungan politik mereka benar-benar solid, satu suara.

Sementara itu, di banding kelompok nelayan, punggawa disebut lebih sering

mementingkan personalnya sebagai penerima barang sebagai kompensasi dukungannya. Punggawa juga memanfaatkan barang untuk mengukuhkan pengaruhnya atas nelayan-nelayan sawi yang bekerja untuknya. Sawi memiliki ketergantungan secara ekonomi pada punggawa karena tidak memiliki sumber daya pendukung untuk mengakses lautan. Dan hal inilah salah satu faktor yang melanggengkan politik patronase di Kecamatan Bontoa. Dalam hubungan politik patronase, masalah ekonomi, yaitu tingkat kesejahteraan atau kemiskinan memiliki pengaruh besar (Muhtadi, 2013).

Sikap mementingkan pribadi punggawa seringkali melahirkan kekecewaan-kekecewaan tersembunyi di kalangan nelayan, sehingga berpeluang memutuskan sendiri pilihannya secara diam-diam. Kekecewaan ini sekaligus memberi peluang bagi kelompok nelayan. Seperti Rusman yang mengakui nilai tawar politik sangat berpengaruh dalam mengakses sumber daya ekonomi, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur bagi nelayan. Karena itu, setiap mendekati pemilihan legislatif dan kepala daerah, mereka sudah membangun komunikasi politik ke kabupaten. Termasuk ketika pemilihan kepala daerah secara serentak bakal digelar pada tahun 2016 di Maros. Pentingnya komunikasi politik dari awal itu diungkapkan Rusman sebagaimana wawancara sebagai berikut:

*“Saya diutus membangun komunikasi politik jauh-jauh hari. Bahkan sebelum pemilihan legislatif. Upaya komunikasi penting dilakukan untuk mengetahui peluang setiap aktor politik pada pemilihan legislatif. Semacam survey kecil-kecilan. Pertimbangannya, dari segi ketokohnya, kedekatannya dengan bupati, aksesnya terhadap proyek yang berkaitan langsung dengan nelayan, dan lain sebagainya. Setelah mengumpulkan data, saya kembali ke desa, dan menggelar rapat dengan anggota kelompok. Mereka menentukan politisi yang akan dipilih pada Pileg. Kami mendiskusikan pula peluang-peluang dari keputusan politik yang diambil bersama. Pilihan pada saat Pileg sangat menentukan pula pada pilihan Pilkada. Karena itu, setiap keputusan di rapat, kami kawal, kami komitmen.”*

Atas dasar itu, Rusman mengaku menjadi pendukung fanatik Haji Idham di Pileg, dan terlibat aktif sebagai tim pemenang kandidat petahana di Desa Ampekale pada Pilkada serentak 2015. Saat itu, seluruh anggota kelompok nelayan yang dipimpinnya, bekerja maksimal, dan satu suara mendukung petanaha. Begitupula dengan keluarga-keluarga mereka di Bontoa.

## **KESIMPULAN**

Dalam implementasi program Sekaya Maritim di Kecamatan Bontoa telah terjadi praktik politik patronase. Sekaya Maritim yang diimplementasikan dalam bentuk proyek (*pork barrel*) seperti pembangunan rabat beton, dermaga dan jembatan, serta bantuan barang (*club goods*) berupa, bantuan bengkel motor, alat tangkap perahu dan bubu, disalurkan

melalui aktor politik perantara (*broker, middleman*). Sementara pola relasi patronase politiknya klientelistik, yaitu terjadi hubungan langsung, personal, dan intensif antara elit dengan aktor politik perantara dan pemilih. Meski hanya terjadi pada geografi dan demografi tertentu, tetapi politik patronase dalam Sekaya Maritim di Kabupaten Maros dapat menggeser tujuan program pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme penyelenggaraan program yang dibarengi dengan sistem distribusi, pendampingan, pengawasan dan evaluasi yang lebih sistematis dari pusat hingga ke daerah. Terutama dalam menentukan objek penerima program, baik dalam bentuk proyek maupun bantuan alat tangkap, sebaiknya tidak hanya melibatkan tim pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan masyarakat nelayan secara partisipatif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall E. & Sukmajati M. (2015). *Politik Uang Di Indonesia (Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014)*. Yogyakarta: PolGov.
- Aspinall E. (2014). Parliament and Patronage. *Journal of Democracy*, 25 (4): 96-110.
- Hiariej E. (2005). *Lahirnya Pasca-Klientelisme di Indonesia*. Savirani, Amalinda dan Tonrquist, Olle (ed.) (2016). *Reclaiming The State; Mengatasi Problem Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto*. Yogyakarta: PolGov & PCD Press.
- Harjanto S. (2012). Pemilu, Politik Patronase dan Ideologi Parpol. *Jurnal Fisip Administrasi dan Kebijakan Publik*, 02 (1) : 81-102
- Hanif H. (2010). Politik Klientelisme Baru dalam Kepartaian di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Politik*, 12 (3) :257-390
- Jonathan S. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta :Graha Ilmu.
- Muhtadi B. (2013). Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia : Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara “Party Id” dan Patron-klien. *Jurnal Politik LIPI*, 10 (1) : 41-58.
- Pelras C. (2009). *Hubungan Patron-Klien pada Masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan*. Tol, Roger dkk (ed.) (2009). *Kuasa dan Usaha di Sulawesi Selatan*. Makassar: Penerbit Innawa.
- Perludem. (2012). Penggunaan Dana Publik Untuk Kampanye. Diakses 14 April 2016. Tersedia di : <http://www.kemitraan.or.id/sites/042.html>
- Scott J. (1972). Patron-client Politics and Political Change in Southeast. *The American Political Science Review*, 66 (1) : 91-113
- Sumarto M. (2014). *Perlindungan Sosial dan Klientelisme: Makna Politik Bantuan Tunai dalam Pemilu*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Weingrod A. (1968). Patrons, Patronage and Political Parties, *Comparative Studies in Society and History*, 10 (4): 377-400